

LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI PENGGUNA
ANGGARAN BA. 018
AUDITED TAHUN ANGGARAN 2024

BPSIP KALIMANTAN SELATAN

(Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024)



Jl. Panglima Batur Barat No.4 P.O Box 1032 Banjarbaru 70714

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian/Lembaga yang dipimpinya.

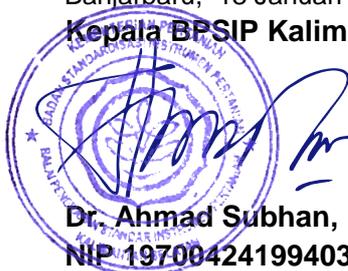
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Selatan selaku Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah Kalimantan Selatan adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Selatan selaku Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah Kalimantan Selatan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Selatan selaku Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah Kalimantan Selatan. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Banjarmaru, 13 Januari 2025

Kepala BPSIP Kalimantan Selatan

The image shows a circular official stamp of the Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) in Banjarmasin. The stamp contains the text 'BADAN PENKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI' and 'BANJARMARU'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink. Below the stamp, the name and NIP of the official are printed.

Dr. Ahmad Subhan, M.Sc
NIP 197004241994031003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan Laporan	iv
I Laporan Realisasi Anggaran	1
II Neraca	2
III Laporan Operasional	3
IV Laporan Perubahan Ekuitas	4
V Catatan Atas Laporan Keuangan	5
A. Penjelasan Umum	5
A.1. Profil dan Kebijakan Teknis	5
A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	5
A.3. Basis Akuntansi	5
A.4. Dasar Pengukuran	5
A.5. Kebijakan Akuntansi	6
B. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	11
B.1. Pendapatan	11
B.2. Belanja	12
B.2.1. Belanja Pegawai	13
B.2.2. Belanja Barang	13
B.2.3. Belanja Modal	14
C. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca	15
C.1. Kas Lainnya dan Setara Kas	15
C.2. Piutang Bukan Pajak	15
C.3. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	15
C.4. Persediaan	16
C.5. Tanah	16
C.6. Peralatan dan Mesin	16
C.7. Gedung dan Bangunan	16
C.8. Jalan, Irigasi dan Jaringan	17
C.9. Aset Tetap Lainnya	17
C.10. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	17
C.11. Aset Tak Berwujud	17
C.12. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	18
C.13. Utang kepada Pihak Ketiga	18
C.14. Ekuitas	18
D. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional	19
D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak	19
D.2. Beban Pegawai	19
D.3. Beban Persediaan	20
D.4. Beban Barang dan Jasa	20
D.5. Beban Pemeliharaan	21

D.6	Beban Perjalanan Dinas	21
D.7	Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat	21
D.8	Beban Penyusutan dan Amortisasi	22
D.9	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	22
D.10	Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	22
D.11	Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	23
E.	Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	24
E.1.	Ekuitas Awal	24
E.2.	Surplus (Defisit) LO	24
E.3.	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	24
E.4.	Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	24
E.5.	Transaksi Antar Entitas	24
E.6.	Ekuitas Akhir	25
F.	Pengungkapan Penting Lainnya	26
VI.	Lampiran dan Daftar	28

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Selatan selaku Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah Kalimantan Selatan yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan periode 31 Desember 2024 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggungjawab UAKPA.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Banjarmaru, 13 Januari 2025

Kepala BPSIP Kalimantan Selatan



Dr. Ahmad Subhan, M.Sc

NIP 197004241994031003

Laporan Keuangan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Selatan selaku BPSIP Kalimantan Selatan Tahun 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Keuangan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp562.188.487 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp562.188.487 atau mencapai 455,21 persen dari estimasi Pendapatan LRA sebesar Rp123.500.000.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp8.399.948.423 atau mencapai 91,77 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp9.153.316.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada 31 Desember 2024 . Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp128.692.384.885 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp186.693.925; Piutang Jangka Panjang sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp128.505.690.960 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp2.500.000 dan Rp128.689.884.885

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp360.192.335 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp9.554.796.724 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp-9.194.604.389, Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp405.751.152 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-8.788.853.237.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 sebesar Rp129.647.029.812, dikurangi Defisit-LO sebesar Rp-8.788.853.237 kemudian dikurangi dengan koreksi-koreksi sebesar -6.051.626 dan Transaksi Antar Entitas sebesar 7.837.759.936 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp128.689.884.885

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis suatu nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CALK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan diajarkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual

BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN SELATAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

U R A I A N	Catatan	TA 2024		% thd Angg	TA 2023
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN DAN HIBAH	B.1.				
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1.	123.500.000	562.188.487	455,21	138.924.778
JUMLAH PENDAPATAN		123.500.000	562.188.487	455,21	138.924.778
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.2.1.	4.322.548.000	3.964.749.018	91,72	3.962.459.815
Belanja Barang	B.2.2.	4.830.768.000	4.435.199.405	91,81	4.134.305.460
Belanja Modal	B.2.3.	-	-	-	1.105.763.342
Belanja Bantuan Sosial	B.2.4.	-	-	-	-
JUMLAH BELANJA		9.153.316.000	8.399.948.423	91,77	9.202.528.617

BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN SELATAN

NERACA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

U R A I A N	Catatan	2024	2023
ASET			
ASET LANCAR			
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.	-	1.936.626
Piutang Bukan Pajak	C.2.	18.905.000	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pa	C.3.	(591.075)	-
Persediaan	C.4.	168.380.000	13.070.000
Jumlah Aset Lancar		186.693.925	15.006.626
ASET TETAP			
Tanah	C.5.	108.622.116.915	108.622.116.915
Peralatan dan Mesin	C.6.	12.867.080.078	12.867.080.078
Gedung dan Bangunan	C.7.	19.260.926.912	19.260.926.912
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.8.	5.012.037.020	5.012.037.020
Aset Tetap Lainnya	C.9.	98.082.767	98.082.767
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.10.	(17.354.552.732)	(16.225.720.506)
Jumlah Aset Tetap		128.505.690.960	129.634.523.186
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.11.	13.372.790	13.372.790
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.12.	(13.372.790)	(13.372.790)
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		128.692.384.885	129.649.529.812
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.13.	2.500.000	2.500.000
Uang Muka dari KPPN	C.14.	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		2.500.000	2.500.000
JUMLAH KEWAJIBAN		2.500.000	2.500.000
EKUITAS			
Ekuitas	C.16.	128.689.884.885	129.647.029.812
JUMLAH EKUTAS		128.689.884.885	129.647.029.812
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		128.692.384.885	129.649.529.812

III. LAPORAN OPERASIONAL

BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN SELATAN

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2024	2023
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	360.192.335	136.349.772
Jumlah Pendapatan		360.192.335	136.349.772
BEBAN			
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.2	3.964.749.018	3.962.459.815
Beban Persediaan	D.3	163.531.150	169.209.290
Beban Barang dan Jasa	D.4	2.709.040.675	2.493.622.780
Beban Pemeliharaan	D.5	884.346.130	590.967.040
Beban Perjalanan Dinas	D.6	678.281.450	898.011.050
Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	25.425.000	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8	1.128.832.226	1.267.583.117
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.9	591.075	-
Jumlah Beban		9.554.796.724	9.381.853.092
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(9.194.604.389)	(9.245.503.320)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	D.10	-	(159.570.000)
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.11	405.751.152	92.690.006
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		405.751.152	(66.879.994)
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		(8.788.853.237)	(9.312.383.314)
Pos Luar Biasa			
Pendapatan PNB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
		-	-
SURPLUS/DEFISIT - LO		(8.788.853.237)	(9.312.383.314)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN SELATAN

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	2024	2023
EKUITAS AWAL	E.1.	129.647.029.812	129.880.904.587
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2.	(8.788.853.237)	(9.312.383.314)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.	-	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4.	(6.051.626)	14.904.700
Penyesuaian Nilai Aset		-	-
Koreksi Nilai Persediaan		(4.115.000)	-
Koreksi Atas Reklasifikasi		-	-
Selisih Revaluasi Aset		-	-
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi		-	14.904.700
Koreksi Lain-Lain		(1.936.626)	-
Jumlah		(6.051.626)	14.904.700
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5.	7.837.759.936	9.063.603.839
KENIAKAN/PENURUNAN EKUITAS		(957.144.927)	(233.874.775)
EKUITAS AKHIR	E.6.	128.689.884.885	129.647.029.812

A. PENJELASAN UMUM

A.1. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS KANTOR WILAYAH AKUNTANSI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Wilayah Akuntansi Provinsi Kalimantan Selatan

Sesuai dengan Permentan Nomor 16 Tahun 2006 tugas dan fungsi (Tusi) BPSIP adalah melaksanakan pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi spesifik lokasi. Sebagai UPT Pusat di daerah, BPSIP Kalimantan Selatan juga bertugas melakukan pendampingan program strategis Kemtan yang cenderung meningkat dan hampir keseluruhan program tersebut diimplementasikan di wilayah kerja BPSIP Kalimantan Selatan. Selain itu juga BPSIP Kalimantan Selatan mengemban tugas administratif sebagai Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang dan Wilayah. Dalam upaya peningkatan efisiensi tupoksi, diperlukan koordinasi dan sinergi program dan kegiatan BPSIP dengan seluruh UK/UPT lingkup BSIP agar lebih berdaya guna. Pendayagunaan unit kerja didasarkan pada potensi yang tersedia, baik sumberdaya manusia, sarana/prasarana, dan anggaran yang tersedia.

Dilihat dari sumberdaya manusia, jumlah SDM BPSIP Kalimantan Selatan sebanyak 45 PNS dan 4 PPPK. Menurut tingkat jabatan SDM BPSIP Kalimantan Selatan terdiri dari 1 (satu) orang Pejabat Struktural, 19 (Sembilan Belas) orang Pejabat Fungsional Khusus, dan 29 (Dua Puluh Sembilan) orang dengan Jabatan Fungsional Umum. Laporan Keuangan Semester II Tahun 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Selatan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan periode 31 Desember 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh BPSIP Kalimantan Selatan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui MONSAKTI yang merupakan aplikasi yang digunakan untuk monitoring interkoneksi, rekonsiliasi, dan penyusunan Laporan Keuangan.

Data yang ditampilkan dan diolah MONSAKTI berasal data SAKTI didukung data SPAN dan data aplikasi lain yang terkait. MONSAKTI dikembangkan selain untuk memenuhi kebutuhan para pengguna SAKTI, juga dalam rangka menjaga performance SAKTI dengan memisahkan fungsi data transaksional (OLTP) dan data pelaporan (OLAP). Pada MONSAKTI terdapat beberapa fitur yang tersedia, di antaranya To Do List, Monitoring, Rekonsiliasi, Laporan (LK & LBMN), Daftar/Rincian, Validitas Data, Download Data Detail, dan Tematik.

Basis Akuntansi

A.3. BASIS AKUNTANSI

Menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai proses historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian yang merupakan entitas pelaporan dari BPSIP Kalimantan Selatan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 187/PB/2017 tentang Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, terdapat perubahan akun-akun terutama pada akun pendapatan negara bukan pajak.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan / atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada adalah sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
 - b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)

- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan	
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	<ol style="list-style-type: none"> 1. Satu bulan terhitung sejak Tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan. 2. Piutang telah diserahkan kepada panitia Urusan Piutang Negara/DJKN 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Satu bulan terhitung sejak Tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan. 2. Piutang telah diserahkan kepada panitia Urusan Piutang Negara/DJKN 	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - * harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - * harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - * harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapasitas sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapasitas tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklafikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN / BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Perhitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 Tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Penggolongan Masa manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas, Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-Lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai normal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi Pendapatan
Rp562.188.487

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp562.188.487 atau mencapai 455,21 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp123.500.000. Pendapatan BPSIP Kalimantan Selatan terdiri dari Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp562.188.487 dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2024		%
	Anggaran	Realisasi	
Penerimaan Negara Bukan Pajak	123.500.000	562.188.487	455,21
Jumlah	123.500.000	562.188.487	455,21

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak mengalami kenaikan sebesar 304,67 persen dibanding tahun sebelumnya. Rincian pendapatan adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Pendapatan Semester II TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Penerimaan Negara Bukan Pajak	562.188.487	138.924.778	304,67
Jumlah	562.188.487	138.924.778	304,67

Realisasi Penerimaan
Negara Bukan Pajak
Rp562.188.487

B.1.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing- masing sebesar Rp562.188.487 dan Rp138.924.778. Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 304,67 dari TA 2023 disebabkan adanya Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dari hasil temuan audit kinerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Selatan untuk TA. 2024 oleh Inspektorat Jendral, dan temuan tersebut telah disetorkan pada Triwulan III sehingga nilai PNBPN di Semester II TA.2024 berjalan lebih besar dibandingkan TA sebelumnya. Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Semester II TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	562.188.487	138.924.778	304,67
Jumlah	562.188.487	138.924.778	304,67

Sedangkan Rincian PNBPN Lainnya adalah sebagai berikut :

Perbandingan PNBPN Lainnya Semester II TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	335.955.250	1.590.000	21.029,26
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	6.308.235	7.614.372	(17,15)
Pendapatan Hasil Penelitian/Riset dan Hasil Pengembangan Iptek	-	127.145.400	(100,00)
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	17.928.850	-	-
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	80.405.000	2.575.006	3.022,52
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	98.245.000	-	-
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	23.346.152	-	-
Jumlah	562.188.487	138.924.778	304,67

Realisasi PNBPN pada LRA senilai Rp 562.188.487 berbeda dengan LO senilai Rp 360.192.335. Terjadi selisih senilai Rp 201.996.152 yaitu berupa penerimaan kembali belanja pegawai, barang dan modal TAYL, hal ini disebabkan nilai tersebut dicatat pada LO bukan pada PNBPN tetapi dicatat pada surplus dari kegiatan non operasional lainnya.

B.2 Belanja

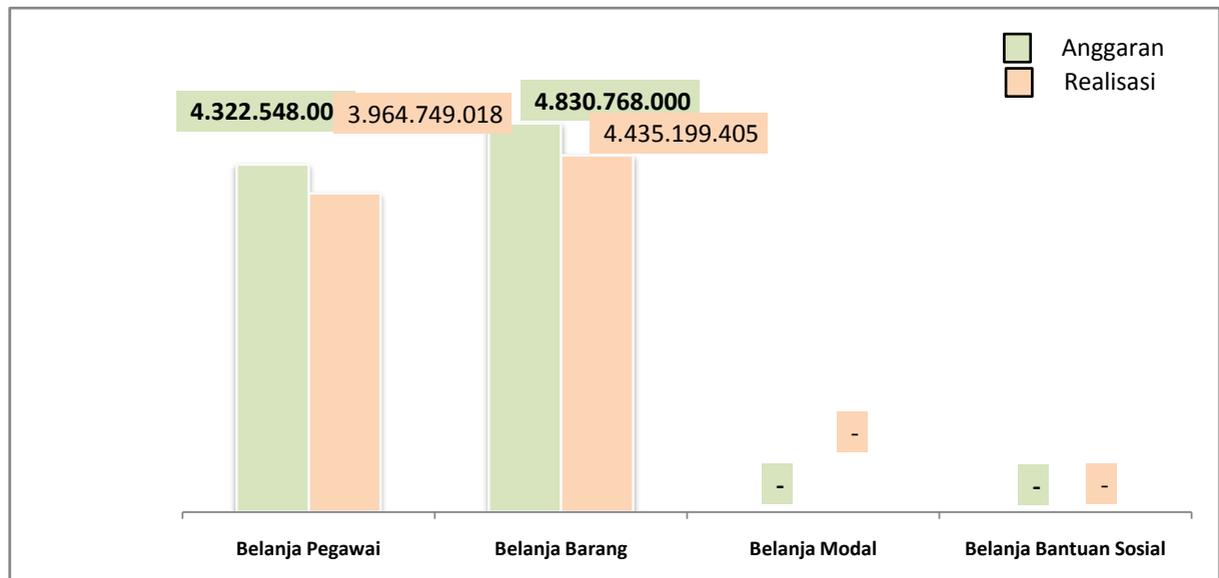
Realisasi Belanja pada TA 2024 adalah sebesar Rp8.399.948.423 atau 91,77 % dari anggaran belanja sebesar Rp.9.153.316.000 Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Semester II TA 2024

URAIAN	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2024		
	Anggaran	Realisasi	% thdp Angg.
Belanja Pegawai	4.322.548.000	3.964.749.018	91,72
Belanja Barang	4.830.768.000	4.435.199.405	91,81
Belanja Modal	-	-	-
Jumlah	9.153.316.000	8.399.948.423	91,77

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Komposisi Anggaran dan Realisasi Tahun 2024



Dibandingkan dengan TA 2023, Realisasi Belanja TA 2024 mengalami penurunan sebesar 8,72% . Berikut rincian realisasi belanja TA 2024 dan TA 2023.

Perbandingan Realisasi Belanja Semester II TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Pegawai	3.964.749.018	3.962.459.815	0,06
Belanja Barang	4.435.199.405	4.134.305.460	7,28
Belanja Modal	-	1.105.763.342	(100,00)
Jumlah	8.399.948.423	9.202.528.617	(8,72)

B.2.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp3.964.749.018 dan Rp3.962.459.815. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus sebagai PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 0,06 % dari TA 2023. Hal ini disebabkan adanya tambahan pegawai ASN pada Satker BPSIP Kalimantan Selatan yaitu penambahan PPPK sebanyak 4 pegawai, sehingga pada Semester II TA berjalan beban gaji lebih besar dibandingkan TA sebelumnya.

Perbandingan Belanja Pegawai Semester II TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Gaji Pokok PNS	2.538.099.600	2.587.595.900	(1,91)
Belanja Pembulatan Gaji PNS	36.183	37.268	(2,91)
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	209.772.020	212.838.980	(1,44)
Belanja Tunj. Anak PNS	54.953.012	55.434.614	(0,87)
Belanja Tunj. Struktural PNS	21.960.000	13.860.000	58,44
Belanja Tunj. Fungsional PNS	149.720.000	236.070.000	(36,58)
Belanja Tunj. PPh PNS	24.432.889	13.677.187	78,64
Belanja Tunj. Beras PNS	137.525.580	150.488.760	(8,61)
Belanja Uang Makan PNS	308.418.000	362.472.000	(14,91)
Belanja Tunjangan Umum PNS	75.805.000	78.295.000	(3,18)
Belanja Gaji Pokok PPPK	168.167.200	34.320.800	389,99
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	3.876	804	382,09
Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	6.885.560	1.058.880	550,27
Belanja Tunjangan Anak PPPK	800.464	211.776	277,98
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	23.880.000	3.120.000	665,38
Belanja Tunjangan Beras PPPK	6.590.220	1.448.400	355,00
Belanja Uang Makan PPPK	25.011.000	7.684.000	225,49
Belanja Uang Lembur	214.170.000	206.366.000	3,78
Jumlah Belanja kotor	3.966.230.604	3.964.980.369	0,03
Pengembalian Belanja Pegawai	1.481.586	2.520.554	(41,22)
Jumlah Belanja	3.964.749.018	3.962.459.815	0,06

Realisasi belanja pegawai pada LRA senilai Rp 3.964.749.018, nilai tersebut sama dengan realisasi belanja pegawai pada LO sebesar Rp 3.964.749.018.

B.2.2. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp4.435.199.405 dan Rp4.134.305.460. Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Realisasi Belanja Barang TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 7,28% dari Realisasi TA 2023.

Tidak ada terlalu banyak perbandingan realisasi antara TA berjalan dengan TA sebelumnya.

Perbandingan Belanja Barang Semester II TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Barang Operasional	1.340.994.700	1.374.373.030	(2,43)
Belanja Barang Non Operasional	1.026.979.700	783.199.100	31,13
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	179.833.430	157.229.290	14,38
Belanja Jasa	341.066.275	318.545.950	7,07
Belanja Pemeliharaan	868.043.850	602.947.040	43,97
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	678.281.450	898.011.050	(24,47)
Jumlah Belanja	4.435.199.405	4.134.305.460	7,28

*Realisasi Belanja Modal
Rp0*

B.2.3. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp1.105.763.342. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2024 mengalami penurunan sebesar 100,00% dibandingkan TA 2023 disebabkan oleh Tidak ada realisasi belanja modal pada Semester II TA berjalan sehingga nilai realisasi TA sebelumnya lebih besar.

Perbandingan Belanja Modal Semester II TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	671.550.000	(100,00)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	217.006.922	(100,00)
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	217.206.420	(100,00)
Jumlah Belanja Kotor	-	1.105.763.342	(100,00)
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	1.105.763.342	(100,00)

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas Lainnya dan Setara Kas Rp0

C.1. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp1.936.626. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP sementara setara kas adalah investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Kas Lainnya dan Setara Kas Semester II TA 2024 dan 2023

Keterangan	TAHUN 2024	TAHUN 2023
Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah	-	1.936.626,00
Jumlah	-	1.936.626

Penjelasan tentang Kas Lainnya dan Setara Kas :

Nilai Hibah ACIAR yang telah disetorkan di Th. 2022 sebesar Rp 1.936.626 sampai dengan Th. 2024 masih tercatat di Kas Lainnya dan Setara Kas. Nilai tersebut telah diperbaiki di Semester II Tahun 2024 dengan melakukan penjumlahan pada modul GLP, sehingga nilai tersebut tidak muncul kembali di neraca.

Piutang Bukan Pajak Rp18.905.000

C.2. Piutang Bukan Pajak

Nilai Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp18.905.000 dan Rp0. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Piutang Bukan Pajak Semester II TA 2024 dan 2023

Jenis Piutang	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023
Piutang Lainnya	18.905.000	-
Jumlah	18.905.000	-

Penjelasan tentang Piutang Bukan Pajak :

Piutang lainnya sebesar Rp 18.905.000 merupakan total TGR tunjangan fungsional penelitian. Ahmad Subhan sebesar Rp 12.180.000 dan Abdul Sabur sebesar Rp 6.725.000.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak Rp591.075

C.3. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp591.075 dan Rp0. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak Semester II TA 2024

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	118.215.000	0,5%	591.075
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	118.215.000		591.075

Penjelasan tentang Penyisihan piutang :

Nilai penyisihan piutang sebesar Rp 591.075 merupakan total nilai penyisihan piutang pada Semester I TA 2024 dari piutang Rp 99.310.000. dengan nilai penyisihan sebesar Rp 496.550, dan nilai pada Semester II TA 2024 dengan nilai piutang sebesar Rp 18.905.000 dengan nilai penyisihan sebesar Rp 94.525.

Persediaan
Rp168.380.000

C.4. Persediaan

Nilai Persediaan tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp168.380.000 dan Rp13.070.000. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan Semester II TA 2024 dan 2023

Jenis	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023
Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	168.380.000	13.070.000
Jumlah	168.380.000	13.070.000

Penjelasan tentang Persediaan :

Persediaan tersebut di atas Merupakan persediaan UPBS dan persediaan ayam KUB.

Tanah
Rp108.622.116.915

C.5. Tanah

Nilai aset tetap berupa Tanah yang dimiliki per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp108.622.116.915 dan Rp108.622.116.915. Nilai Tanah tersebut . Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024	108.622.116.915
Mutasi tambah :	
Mutasi kurang :	
Saldo per 31 Desember 2024	108.622.116.915

Peralatan dan Mesin
Rp12.867.080.078

C.6. Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp12.867.080.078 dan Rp12.867.080.078. Nilai Peralatan dan Mesin dan mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024	12.867.080.078
Mutasi tambah:	
Mutasi Kurang:	
Saldo per 31 Desember 2024	12.867.080.078
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(12.111.169.527)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	755.910.551

Gedung dan Bangunan
Rp19.260.926.912

C.7. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp19.260.926.912 dan Rp19.260.926.912. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024	19.260.926.912
Mutasi tambah:	
Mutasi Kurang:	
Saldo per 31 Desember 2024	19.260.926.912
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(3.622.431.606)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	15.638.495.306

Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp5.012.037.020

C.8. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp.5.012.037.020 dan Rp.5.012.037.020. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024	5.012.037.020
Mutasi tambah:	
Mutasi Kurang:	
Saldo per	5.012.037.020
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(1.620.951.599)
Nilai Buku per	3.391.085.421

Aset Tetap Lainnya
Rp98.082.767

C.9. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp.98.082.767 dan Rp.98.082.767. Aset tetap tersebut . Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024	98.082.767
Mutasi tambah:	
Mutasi Kurang:	
Saldo per 31 Desember 2024	98.082.767
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	-
Nilai Buku per 31 Desember 2024	98.082.767

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Rp17.354.552.732

C.10. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing Rp17.354.552.732 dan Rp16.225.720.506. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Semester II Tahun 2024

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	12.867.080.078	(12.111.169.527)	755.910.551
2	Gedung dan Bangunan	19.260.926.912	(3.622.431.606)	15.638.495.306
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.012.037.020	(1.620.951.599)	3.391.085.421
4	Aset Tetap Lainnya	98.082.767	-	98.082.767
Akumulasi Penyusutan		37.238.126.777	(17.354.552.732)	19.883.574.045

Aset Tak Berwujud
Rp13.372.790

C.11. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp13.372.790 dan Rp13.372.790. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga pada BPSIP Kalimantan Selatan berupa Software.

Mutasi Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai per 1 Januari 2024	13.372.790
Mutasi tambah:	
Mutasi Kurang:	
Koreksi Pencatatan	-
Saldo Nilai per 31 Desember 2024	13.372.790
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2024	(13.372.790)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	-

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya 13.372.790

C.12. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp13.372.790 dan Rp13.372.790. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Sedangkan Amortisasi Aset Lainnya merupakan akumulasi amortisasi tak berwujud yang mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui pemerintah dari sejak diperoleh atau atau dibeli oleh satker. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Aset Tak Berwujud	13.372.790	(13.372.790)	-
Total	13.372.790	(13.372.790)	-

Utang kepada Pihak Ketiga Rp2.500.000

C.13. Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp2.500.000 dan Rp2.500.000. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A.2023
Beban Barang yang Masih Harus Dibayar	2.500.000	2.500.000
Total	2.500.000	2.500.000

Penjelasan tentang Utang kepada Pihak Ketiga :

merupakan beban langganan PDAM bulan Desember Tahun 2024

Ekuitas Rp128.689.884.885

C.14. Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp128.689.884.885. dan Rp129.647.029.812. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pendapatan Negara
Bukan Pajak
Rp360.192.335

D. PENJELASAN ATAS POS-POS OPERASIONAL

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp360.192.335 dan Rp136.349.772. Realisasi pendapatan negara bukan pajak mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 164,17. Rincian Pendapatan tersebut adalah sebagai berikut :

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Semester II TA 2024 dan 2023

URAIAN	2024	2023	%
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	335.955.250	1.590.000,00	21.029,26
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	6.308.235	7.614.372,00	(17,15)
Pendapatan Hasil Penelitian/Riset dan Hasil Pengembangan Iptek	-	127.145.400,00	(100,00)
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	17.928.850	-	-
Jumlah	360.192.335,00	136.349.772,00	164,17

Realisasi PNBPN pada LO senilai Rp 360.192.335 berbeda dengan LRA senilai Rp 562.188.487. Terjadi selisih senilai Rp 201.996.152 yaitu berupa penerimaan kembali belanja pegawai, barang dan modal TAYL, hal ini disebabkan nilai tersebut dicatat pada LO bukan pada PNBPN tetapi dicatat pada surplus dari kegiatan non operasional lainnya.

Beban Pegawai
Rp3.964.749.018

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp3.964.749.018 dan Rp3.962.459.815.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.. Beban Pegawai Tahun 2024 sebesar 0,06 persen dibandingkan dengan Tahun 2023. Rincian Beban Pegawai Semester II Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pegawai Semester II TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Beban Gaji Pokok PNS	2.538.099.600	2.587.595.900	(1,91)
Beban Pembulatan Gaji PNS	34.713	36.714	(5,45)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	209.772.020	212.838.980	(1,44)
Beban Tunj. Anak PNS	54.953.012	55.434.614	(0,87)
Beban Tunj. Struktural PNS	21.960.000	13.860.000	58,44
Beban Tunj. Fungsional PNS	148.240.000	236.070.000	(37,21)
Beban Tunj. PPh PNS	24.432.889	13.677.187	78,64
Beban Tunj. Beras PNS	137.525.580	150.488.760	(8,61)
Beban Uang Makan PNS	308.418.000	362.472.000	(14,91)
Beban Tunjangan Umum PNS	75.805.000	75.775.000	0,04
Belanja Gaji Pokok PPPK	168.167.200	34.320.800	389,99
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	3.760	804	367,66
Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	6.885.560	1.058.880	550,27
Belanja Tunjangan Anak PPPK	800.464	211.776	277,98
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	23.880.000	3.120.000	665,38

Belanja Tunjangan Beras PPPK	6.590.220	1.448.400	355,00
Belanja Uang Makan PPPK	25.011.000	7.684.000	225,49
Beban Uang Lembur	214.170.000	206.366.000	3,78
Jumlah	3.964.749.018	3.962.459.815	0,06

Realisasi belanja pegawai pada LO senilai Rp 3.964.749.018, nilai tersebut sama dengan realisasi belanja pegawai pada LRA sebesar Rp 3.964.749.018.

Beban Persediaan
Rp163.531.150

D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp163.531.150 dan Rp169.209.290

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi barang-barang yang habis dipakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 3,36 persen dibandingkan dengan Tahun 2023. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Semester II TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Beban Persediaan konsumsi	163.201.150	169.209.290	(3,55)
Beban Persediaan bahan baku	330.000	-	-
Jumlah Beban Persediaan	163.531.150	169.209.290	(3,36)

Beban Barang dan Jasa
Rp2.709.040.675

D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2.709.040.675 dan Rp2.493.622.780.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 8,64 persen dibandingkan dengan Tahun 2023. Rincian Beban Barang dan Jasa Untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang dan Jasa Semester II TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Beban Keperluan Perkantoran	1.011.129.700	986.876.530	2,46
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	59.040.000	143.620.000	(58,89)
Beban Barang Operasional Lainnya	270.825.000	237.510.000	14,03
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	6.366.500	(100,00)
Beban Bahan	765.779.700	672.974.100	13,79
Beban Honor Output Kegiatan	9.200.000	29.950.000	(69,28)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	252.000.000	80.275.000	213,92
Beban Langganan Listrik	212.427.750	203.943.150	4,16
Beban Langganan Telepon	35.836.900	33.041.850	8,46
Beban Langganan Air	48.151.625	50.560.950	(4,77)
Beban Jasa Profesi	11.400.000	31.000.000	(63,23)
Jumlah	2.709.040.675	2.493.622.780,00	8,64

Beban Pemeliharaan
Rp884.346.130

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp884.346.130 dan Rp590.967.040.

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 49,64 persen dibandingkan dengan Tahun 2023 Rincian Beban Pemeliharaan untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pemeliharaan Semester II TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	474.816.050	309.911.890	53,21
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	375.227.800	281.055.150	33,51
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	34.302.280	-	-
Jumlah	884.346.130	590.967.040	49,64

Beban Perjalanan Dinas
Rp678.281.450

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp678.281.450 dan Rp898.011.050

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 24,47 persen. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2024 dan 2023 :

Rincian Beban Perjalanan Dinas Semester II TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Beban Perjalanan Biasa	588.281.450	896.031.050	(34,35)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	90.000.000	1.980.000	4.445,45
Jumlah	678.281.450,00	898.011.050	(24,47)

Beban Barang Untuk
Diserahkan kepada
Masyarakat
Rp25.425.000

D.7. Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp25.425.000 dan Rp0

Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang dan jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 0,00 dibandingkan dengan Tahun 2023. Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Semester II TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Beban Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	25.425.000	-	-
Jumlah	25.425.000,00	-	-

Beban persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp 25.425.000 merupakan hasil penjualan persediaan benih UPBS dan ayam KUB.

Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp1.128.832.226

D.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.128.832.226 dan Rp1.267.583.117.

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Semester II TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	390.968.277	516.851.581	(24,36)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	516.317.884	521.674.640	(1,03)
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	53.956.448	61.467.280	(12,22)
Beban Penyusutan Irigasi	164.630.456	164.630.456	-
Beban Penyusutan Jaringan	2.959.161	2.959.160	0,00
Jumah Penyusutan	1.128.832.226	1.267.583.117	(10,95)
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah	1.128.832.226	1.267.583.117	(10,95)

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Rp591.075

D.9. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp591.075 dan Rp0

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Semester II TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	591.075	-	-
Jumlah	591.075,00	-	-

Penjelasan tentang Penyisihan piutang :

Nilai penyisihan piutang sebesar Rp 591.075 merupakan total nilai penyisihan piutang pada Semester I TA 2024 dari piutang Rp 99.310.000. dengan nilai penyisihan sebesar Rp 496.550, dan nilai pada Semester II TA 2024 dengan nilai piutang sebesar Rp 18.905.000 dengan nilai penyisihan sebesar Rp 94.525.

Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar
Rp0

D.10. Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar

Jumlah Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp-159.570.000

Rincian Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar Semester II TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Beban Kerugian Pelepasan Aset	-	(159.570.000)	(100)
Jumlah	-	(159.570.000)	(100)

D.11. Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp405.751.152 dan Rp92.690.006.

Rincian Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Semester II TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	99.310.000	2.575.006,00	3.756,69
Penerimaan Kembali Beban Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	98.245.000	-	-
Penerimaan Kembali Beban Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	23.346.152	-	-
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	184.850.000	90.115.000,00	105
Jumlah	405.751.152,00	92.690.006	337,75

Penerimaan kembali beban pegawai TAYL merupakan pengembalian belanja tunjangan fungsional peneliti dari bulan September 2022 s.d September 2023 sebanyak 5 pegawai, yaitu an. :

1. Dr. Ahmad Subhan, M.Sc sebesar Rp 34.660.000
2. Lelya Pramudyani, SP, MP sebesar Rp 23.475.000
3. Abdul Sabur, S.Hut, MP sebesar Rp 13.725.000
4. Awanis, STP, M.Si sebesar Rp 13.725.000
5. Fiqy Hilmawan, S.Pt, M.Si sebesar Rp 13.725.000

Penerimaan kembali beban pegawai TAYL merupakan penerimaan kembali belanja barang dari Honorarium operasional kantor yang tidak sesuai ketentuan seluruhnya TA 2023 sebesar Rp 98.245.000.

Penerimaan kembali beban modal TAYL merupakan Penerimaan kembali belanja modal dari kelebihan pembayaran pengadaan Konstruksi pagar,jalan dan jasa Konsultasi kepada CV Citra Karya Maharani untuk konstruksi jalan, kelebihan pembayaran pengadaan konstruksi pagar,jalan dan jasa konsultasi kepada CV. Widyadana Sultan untuk jasa konsultasi pengawasan, dan kelebihan pembayaran pengadaan konstruksi pagar, jalan dan jasa konsultasi kepada VC. Arian Jaya untuk konstruksi pagar TA 2023 sebesar Rp 23.346.152.

Penerimaan kembali beban modal TAYL merupakan Penerimaan kembali belanja modal dari kelebihan pembayaran pengadaan Konstruksi pagar,jalan dan jasa Konsultasi kepada CV Citra Karya Maharani untuk konstruksi jalan, kelebihan pembayaran pengadaan konstruksi pagar,jalan dan jasa konsultasi kepada CV. Widyadana Sultan untuk jasa konsultasi pengawasan, dan kelebihan pembayaran pengadaan konstruksi pagar, jalan dan jasa konsultasi kepada VC. Arian Jaya untuk konstruksi pagar TA 2023 sebesar Rp 23.346.152.

Pendapatan perolehan aset lainnya sebesar Rp 184.850.000 merupakan penambahan nilai persediaan UPBS dan persediaan ayam KUB di Semester II TA 2024.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp129.647.029.812,00

E.1 Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.129.647.029.812,00 dan Rp.129.880.904.587,00

Defisit LO Rp.-
8.788.853.237,00

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus (Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp.-8.788.853.237,00 dan Rp.-9.312.383.314,00. Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Dampak Kumulatif
Perubahan Kebijakan
Akuntansi/Kesalahan
Mendasar Rp.0,00

E.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

E.4 KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas tahun pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.-6.051.626 dan Rp.14.904.700 yaitu sebagai berikut .

Koreksi Nilai Persediaan
Rp-4.115.000,00

E.4.1 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi untuk tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.-4.115.000,00 dan Rp.0,00. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Persediaan	(4.115.000)
Jumlah	(4.115.000,0)

Merupakan koreksi nilai jual benih UPBS yang sudah kadaluarsa, sehingga ada penyusutan nilai barang persediaan.

Koreksi Lain-Lain Rp-
1.936.626

E.4.2 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.-1.936.626 dan Rp.0. Koreksi Lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi Lain-Lain terdiri dari :

Rincian Koreksi Lain-Lain Tahun 2024

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi Lainnya	(1.936.626)
Jumlah	(1.936.626,0)

Nilai Hibah ACIAR yang telah disetorkan di Th. 2022 sebesar Rp 1.936.626 sampai dengan Th. 2024 masih tercatat di Kas Lainnya dan Setara Kas. Nilai tersebut telah diperbaiki di Semester II Tahun 2024 dengan melakukan penjurnalan pada modul GLP, sehingga nilai tersebut tidak muncul kembali di neraca.

Transaksi Antar Entitas
Rp7.837.759.936

E.5 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.7.837.759.936 dan Rp.9.063.603.839. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal Kementerian /Lembaga (KL), antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. terdiri dari :

Rincian Transaksi Antar Entitas Tahun 2024

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	8.399.948.423
Diterima dari Entitas Lain	(562.188.487)
Jumlah	7.837.759.936

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari :

E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2024, DKEL sebesar Rp 8.399.948.423, sedangkan DDEL sebesar Rp 562.188.487

Ekuitas Akhir
Rp128.689.884.885

E.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.128.689.884.885,00 dan Rp.129.647.029.812,00.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

A. Penyelesaian Piutang Kelebihan Tunjangan Fungsional

Sesuai dengan surat Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian nomor B-1560/KU.060/H.1/06/2024 perihal Penyelesaian Piutang Kelebihan Tunjangan Fungsional, maka pada Satker Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Selatan telah dicatat kelebihan tunjangan fungsional pada modul piutang sebagai pengungkapan dalam Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan Baru	Pengembalian ke Kas Negara
1	Dr. Ahmad Subhan, M.Sc	Kepala BPSIP Kalimantan Selatan / Analisis Standardisasi Ahli Madya	Rp 34.660.000,00
2	Lelya Pramudyani, SP, MP	Analisis Standardisasi Ahli Muda	Rp 23.475.000,00
3	Abdul Sabur, S.Hut, MP	Analisis Standardisasi Ahli Muda	Rp 13.725.000,00
4	Awanis, STP, M.Si	Analisis Standardisasi Ahli Pertama	Rp 13.725.000,00
5	Fiqy Hilmawan, S.Pt, M.Si	Analisis Standardisasi Ahli Pertama	Rp 13.725.000,00
		Jumlah	Rp 99.310.000,00

Pengembalian belanja Tahun Anggaran Yang Lalu telah disetorkan oleh Bendahara Penerimaan sampai dengan bulan Desember tahun 2024. Sisa piutang yang masih tercatat dan belum dibayarkan an. Dr. Ahmad Subhan, M.Sc sebesar Rp 12.180.000, dan an. Abdul Sabur, S.Hut, MP sebesar Rp 6.725.000. Dokumen pendukung terkait penyelesaian piutang berupa Surat Pernyataan dari Kepala BPSIP Kalimantan Selatan, SPTJM, Bukti Setor Pembayaran, SK pemberhentian dan pengangkatan jabatan fungsional terlampir.

B. Penyelesaian Temuan Hasil Audit Kinerja

Menindaklanjuti hasil audit Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sesuai Surat Tugas Inspektur IV, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Nomor B.0256/PW.130/G.5/07/2024 tanggal 29 Juli 2024 atas kelebihan pembayaran pada pengelolaan Anggaran TA 2023 pada Balai Pengujian Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Selatan seluruhnya senilai Rp 258.610.502.

No	Keterangan	Nilai
1.	Denda keterlambatan pengadaan kontrak nomor CV. Cahaya Bulan Cakrawala Pengadaan Sarana Laboratorium Standardisasi Tahun 2023	Rp 17.928.850,00
2.	Kelebihan pembayaran kemahalan harga pengadaan sarana laboratorium standardisasi tahun 2023	Rp 6.300.000,00
3.	Kekurangan setoran PNBP dari hasil Produksi Benih Sumber Padi TA 2023	Rp 1.622.500,00
4.	Kekurangan setoran PNBP dari Kegiatan Produksi Bibit Ayam KUB	Rp 54.278.500,00
5.	PNBP atas pengelolaan Kebun Percobaan (KP) Pelaihari dan KP Banjarbaru	Rp 8.879.500,00
6.	Honorarium operasional satker yang tidak sesuai ketentuan seluruhnya dan pemeliharaan	Rp 83.520.000,00

7.	Kelebihan pembayaran atas pengadaan kontruksi pagar, jalan dan jasa konsultasi kepada CV. Cita Karya Maharani untuk konstruksi Jalan	Rp 2.646.613,00
8.	Kelebihan pembayaran atas pengadaan kontruksi pagar, jalan dan jasa konsultasi kepada CV. Cita Karya Maharani untuk konstruksi Jalan	Rp 3.342.376,00
9.	Kelebihan pembayaran atas pengadaan kontruksi pagar, jalan dan jasa konsultasi kepada CV. Widyadana Sultan untuk jasa konsultan pengawasan	Rp 11.057.163,00
10.	Pengguna anggaran yang tidak dapat dibenarkan atas honor Tim	Rp 14.725.000,00
11.	Pengembalian Tunjangan Jabatan Fungsional Peneliti sampai dengan pelaksanaan audit	Rp 54.310.000,00
Total		Rp 258.610.502,00

Hasil temuan audit kinerja untuk TA 2023 telah disetorkan sebesar 204.300.502, dengan akun 425112 Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya sebesar Rp 64.780.500, akun 425811 Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah sebesar 17.928.850, akun 425912 Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp 98.245.000 dan akun 425913 Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp 23.346.152.

Temuan Hasil audit kinerja berupa pengembalian tunjangan jabatan fungsional peneliti sampai dengan pelaksanaan audit sebesar Rp 54.310.000 telah dibayarkan, dan masih tersisa sebesar Rp 18.905.000 merupakan total TGR tunjangan fungsional peneliti an. Ahmad Subhan sebesar Rp 12.180.000 dan Abdul Sabur sebesar Rp 6.725.000. Dokumen pendukung terkait penyelesaian temuan hasil audit kinerja berupa Bukti Setor Pembayaran dan SPTJM terlampir.